

**REALISASI POLITIK EKSPANSI JEPANG:  
STUDI KEBIJAKAN *SHUMUBU* TERHADAP MADRASAH  
DI JAWA TAHUN 1942-1945**



**TESIS**

**Oleh:**

**Farida Yuliana Safitri, S.Pd**

**NIM. 1420510125**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Humaniora  
Program Studi Agama dan Filsafat  
Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Yuliana Safitri, S.Pd

Nim : 1420510125

Jenjang : Magister

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Farida Yuliana Safitri, S.Pd

NIM. 1420510125

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Yuliana Safitri, S.P.d  
NIM : 1420510125  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Agama dan Filsafat  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Farida Yuliana Safitri, S.P.d  
NIM: 1420510125

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**REALISASI POLITIK EKSPANSI JEPANG: STUDI KEBIJAKAN SHUMUBU TERHADAP MADRASAH DI JAWA TAHUN 1942-1945**

Yang ditulis oleh:

Nama : Farida Yuliana Safitri, S.Pd

Nim : 1420510125

Jenjang : Magister

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Pembimbing



**Dr. Nurul Hak, M.Hum**

NIP. 19700117 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : REALISASI POLITIK EKSPANSI JEPANG : STUDI KEBIJAKAN  
SHUMUBU TERHADAP MADRASAH DI JAWA TAHUN 1942-1945

Nama : Farida Yuliana Safitri, S.Pd.

NIM : 1420510125

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Agama Filsafat

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Tanggal Ujian : 28 Juli 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.)

Yogyakarta, 03 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : REALISASI POLITIK EKSPANSI JEPANG : STUDI KEBIJAKAN  
SHUMUBU TERHADAP MADRASAH DI JAWA TAHUN 1942-1945

Nama : Farida Yuliana Safitri, S.Pd.

NIM : 1420510125

Program Studi : Agama Filsafat

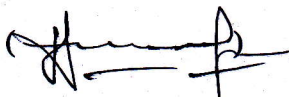
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

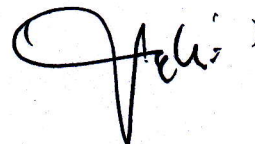
Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Ibnu Burdah, M.Hum.

(  )

Pembimbing/Penguji : Dr. Nurul Hak, M. Hum.



Penguji : Dr. H. Muhammad Wildan, MA.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2016

Waktu : 12.00 wib.

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : ~~Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan~~

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.(Al-Baqarah: 286)

“Banyak usaha, banyak belajar, banyak berdoa, sedikit mengeluh,  
dengan Bismillah saya melangkah”

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur pada Rabb penggenggam jiwa, karya ini  
kupersembahkan untuk:

⊖ Ibu dan ayahku tercinta yang telah mencurahkan segala cinta, kasih  
sayangnya dan jerih payah serta pengorbanannya dalam mendidiku,  
menuntunku untuk menjadi yang terbaik dan senantiasa mengiringi  
setiap langkahku dengan doa dan ridhoNya.

Kubingkiskan Tesis ini untuk

⊖ Adik tercinta, calon Imamku dan Keluarga Besaraku

semoga selalu dianugerahi kebaikan dan cinta dari Allah.

## ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian terhadap realisasi politik ekspansi Jepang studi kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah tahun 1942-1945 di Jawa. Jepang meletakkan *Shumubu* yaitu Departemen Agama yang mengurus masalah keislaman dan pendidikan madrasah. Pendirian *Shumubu* tidak terlepas dari kepentingan ekspansi Jepang dalam perang Asia Timur Raya, oleh karena itu kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah juga merupakan realisasi politik Jepang di Jawa. Tujuan penelitian ini mengetahui campur tangan Jepang dalam menentukan kebijakan *Shumubu* dan implikasinya terhadap madrasah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Artinya memberikan gambaran usaha politik Jepang mempengaruhi *Shumubu* untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan perang Jepang, dan menganalisa kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah melalui perubahan kurikulum untuk menyediakan tenaga perang atas nama perang suci. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan menggunakan teori hegemoni yang diusung oleh Antonio Gramsci juga teori kebijakan politik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah Louis Gootchalk meliputi empat tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Kedatangan Jepang di Jawa dalam rangka memenuhi kebutuhan perang Jepang. Sehingga dengan cepat Jepang melakukan perubahan sosial-politik dan sosial-keagamaan. Kebijakan Jepang terhadap keagamaan di Jawa dibangun dalam rangka mendapatkan dukungan dan simpati umat Islam untuk dimanfaatkan membangun Persemakmuran Asia Timur Raya. 2. Pendirian *Shumubu* oleh Jepang dimaksudkan untuk memobilisasi dan mengawasi gerak umat Islam tanpa adanya kecurigaan, sekaligus alat propaganda Jepang. Merasa tidak puas, *Shumubu* mendirikan *Shumuka* untuk melakukan kontrol dan kontak yang lebih intensif antara pusat dan daerah sehingga cengkraman Jepang terhadap Islam semakin kuat. 3. Kebijakan Jepang terhadap *Shumubu* berpengaruh besar terhadap madrasah, tidak lagi menciptakan generasi muslim intelektual akan tetapi madrasah dijadikan lahan pemenuhan tenaga perang melalui semangat *jihad*. Implikasi kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah yaitu masuknya doktrin-doktrin militer Jepang dalam menghimpun kekuatan di lingkungan madrasah demi kemakmuran Bersama. Peran madrasah sebagai tangan kanan Jepang cukup intensif memupuk semangat persaudaraan Islam demi kepentingan Dai Nippon. Pada zaman ini peran madrasah tidak mengalami perkembangan yang signifikan kecuali bagi penguasa.

Kata Kunci: Politik Ekspansi Jepang, Kebijakan *Shumubu*, Madrasah.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله منزل الكتاب، الهاد الى الصواب، والصلاة والسلام على خير من أوتى الحكمة وفصل الخطاب.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan yang mulia nabi agung Muhammad saw. Penyusunan tesis ini merupakan kajian dan penulisan tentang REALISASI POLITIK EKSPANSI JEPANG: STUDI KEBIJAKAN SHUMUBU TERHADAP MADRASAH TAHUN 1942-1945 DI JAWA yang diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Agama dan Filsafat.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan kerjasama dari berbagai pihak sulit rasanya dapat menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Rof'ah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D. dan Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Nurul Hak, M.Hum., selaku Pembimbing tesis yang senantiasa memberikan arahan dan saran selama penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menginspirasi dan memberikan ‘spirit keilmuan‘ yang sangat berarti bagi penulis.
6. Segenap Staf Tata Usaha Pascasarjana, Staf Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas segala bantuannya, sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh studi ini.
7. Ibuku Musyidatun, Bapakku Aliman, dan Adikku Haidar Dwi Yudantoro tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan moral dan material serta doa yang tiada henti-hentinya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang-Nya.
8. Keluarga besarku, kakung, mbah putri, budhe, bulik, sepupuku dan yang lainnya terimakasih selalu memberikan semangat untukku.
9. Calon imamku insyaallah Umam Ahmad terimakasih selalu memberikan semangat agar aku cepat menyelesaikan studi.
10. Teman-teman SKI angkatan 2014, Syafira, kak Lisa, mbak Ana, Tahanil, Cipto, Juma, kak Marsus, Bagus, Man, Bambang, bang Zen, Iqbal, mas Aziz, Sidik, kak Rusdi, dan Samsul.

11. Rekan-rekan kerja di SMA Negeri 1 Pakem, Sleman dan Pengajar Ganesha Operation zona Sleman.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dari awal hingga sekarang. Terima kasih untuk semua guru yang pernah mengajarku dari kecil dari tidak bisa apa-apa hingga bisa sampai di tahap ini. Semoga Allah senantiasa membalasnya.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini untuk ke depannya. Harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Penulis

Farida Yuliana Safitri, S.Pd  
NIM : 1420510125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	0
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Landasan Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	28

## **BAB II: KONTEKS MASYARAKAT JAWA MASA PENDUDUKAN**

<b>JEPANG 1942-1945 DI JAWA.....</b>	<b>30</b>
A. Latar Belakang Historis Penjajahan Jepang di Jawa .....	30
1. Sebelum Kedatangan Jepang di Jawa .....	30
2. Masa Kedatangan Jepang di Jawa .....	31
3. Usaha Jepang pada awal Pendudukan Jepang di Jawa .....	33
4. Propaganda Jepang di Jawa .....	34
B. Konteks Sosial-Politik Masyarakat Jawa Tahun 1942-1945 .....	40
1. Konteks Sosial Masyarakat Jawa saat Pendudukan Jepang .....	40
2. Konteks Politik Masyarakat Jawa saat Pendudukan Jepang.....	46
3. Usaha-usaha Jepang Memobilisasi Rakyat di Jawa .....	49
C. Konteks Sosial-Keagamaan Masyarakat Jawa Tahun 1942-1945 .....	54
1. Keadaan Sosial- Keagamaan sebelum Kedatangan Jepang .....	54
2. Aktifitas Keagamaan masa Pendudukan Jepang .....	55

## **BAB III: KEBIJAKAN POLITIK JEPANG TERHADAP KEAGAMAAN**

<b>ISLAM DI JAWA .....</b>	<b>56</b>
A. Konsep Politik Jepang .....	56
B. Kebijakan Politik Jepang .....	57
1. Pembubaran Aktifitas Politik .....	57
2. Pembentukan <i>Shumubu</i> .....	59
3. Sosialisasi Program <i>Shumubu</i> .....	64
4. Pembentukan <i>Shumuka</i> .....	72

**BAB IV: KEBIJAKAN *SHUMUBU* DALAM PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MADRASAH DI JAWA**

A. Pendidikan Umum Di Masa Jepang .....	78
1. Kebijakan Jepang terhadap Pendidikan .....	78
2. Tujuan Pendidikan .....	79
3. Tingkatan Pendidikan .....	80
4. Kurikulum Pendidikan .....	83
5. Tenaga Pengajar .....	86
B. Pendidikan Islam Di Masa Jepang .....	88
1. Sejarah Madrasah .....	88
2. Kurikulum Madrasah .....	91
3. Tenaga Pengajar .....	92
C. Kebijakan <i>Shumubu</i> Terhadap Madrasah dan Implikasinya .....	93
1. Indoktrinasi Madrasah .....	93
2. Perubahan Fungsi Madrasah .....	96
3. Militerisme dalam Madrasah .....	97
4. Hubungan Militerisme dengan Implementasi Kebijakan Madrasah .....	104

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	110

**DAFTAR PUSTAKA .....** 111

**CURRICULUM VITAE .....** 121

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....** 122

## DAFTAR ISTILAH

Ashamu Shudan	= Pemerintah Militer
Budancho	= Kepala Regu
Bunkyo Kyoku	= Bagian Pendidikan/Pengajaran
Bushido	= Semangat Berani Mati
Chudancho	= Komandan Kompi
Cuo Sangi In	= Dewan Pertimbangan Pusat
Dai Ni Nankenkantai	= Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya
Daidancho	= Komandan Batalyon
Daitoa Kyociken	= Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya
Fujinkai	= Organisasi Wanita di Zaman Jepang
Guncho	= Wedana
Gunseibu	= Kantor Pemerintahan Balatentara Tingkat Daerah
Gunseikan	= Kepala Staf Tentara menjabat Gubernur Militer
Gunseikanbu	= Pemerintahan Pusat
Hakko Ichi U	= Paham dunia baru di bawah pimpinan Jepang
Hakko Seishin	= Kebaktian Rakyat
Heiho	= Perajurit pembantu tentara Jepang
Hinomaru	= Bendera kebangsaan Jepang
Hodokan	= Kantor Penerangan Surat Kabar
Jawa Hokokai	= Kebaktian Rakyat Jawa
Kaigun	= Angkatan Laut

Keibodan	= Barisan Pembantu Polisi
Kempeitai	= Korps Polisi Militer
Kerei	= penghormatan terhadap sesama orang saat bertemu
Kokumin Gakko	= Sekolah Rakyat selama tiga tahun, kelas 4-6
Kooti/Kochi	= Sebutan Daerah Istimewa
Kumicho	= Pemimpin Rukun Tetangga
Kyoren	= Latihan Militer
Minseibu	= Armada Angkatan Laut Selatan
Nanyo	= Daerah Timur Jauh
Nanshin	= Perluasan Jepang ke daerah Selatan untuk mendapatkan SDA
Nippon	= Jepang
Nippon Eigakosha	= Badan pembuat film berita, kebudayaan dan propaganda yang berpusat di Tokyo.
Nippon Seisin	= Latihan kemiliteran dan semangat ala Jepang, disiplin dan kerja keras
Osamu-Seirei	= Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh <i>Saiko Shikikan</i> (Panglima Tertinggi)
Sagyo	= Pelajaran Praktis
Saiko Shikikan	= Panglima Tertinggi
San A Seinenkurensyo	= Pusat Latihan Pemuda Tiga A
Sedenbu	= Departemen Propaganda Jepang

Seinendan	= Barisan Pemuda
Sekerei	= Membungkuk ke arah matahari sebagai penghormatan terhadap kaisar Jepang
Senbu Kosaku	= Operasi Propaganda Oleh Jepang
Shushin	= Pelajaran Moral
Shoto Kokumin Gakko	= Sekolah pertama selama tiga tahun, kelas 1-3
Shumubu	= Kantor Urusan Agama di zaman Jepang
Shumuka	= Seksi Urusan Agama di tingkat daerah
Syu	= Daerah Karesidenan di zaman Jepang
Taiso	= Gerak Badan/ olahraga (gerakan bersenam)
Tenchosetsu	= Hari Lahir Kaisar Jepang
Tokubetsu-shi	= Daerah Istimewa
Tomi Shudan	= Pemerintah Militer Angkatan Darat
Tonarigumi	= Rukun Tetangga
Romusha	= Kerja Paksa

## DAFTAR TABEL

1. Penggilingan Beras per Karesidenan pada 1941 .....	38
2. Permintaan dan Penyerahan Padi (April 1944-Maret 1945).....	39
3. Angka Kelahiran dan Kematian di Jawa saat Pendudukan Jepang.....	41
4. Jumlah <i>Tonarigumi</i> April 1944.....	53
5. Peserta Latihan Alim Ulama Menurut Karesidenan .....	68
6. <i>Shumuka-cho</i> Masing-masing Karesidenan.....	75
7. Jumlah Sekolah Rakyat, Guru dan Murid .....	81
8. Jadwal pelajaran Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat) di Pakualaman Yogyakarta Pada hari Selasa .....	82
9. Daftar Nama Lagu Jepang dan Indonesia yang harus dinyanyikan .....	85
10. <i>Kokumin Gakko Kyoju Yonaku</i> Peraturan Pelajaran Militer (Kyoren) di Sekolah .....	95
11. Keanggotaan dalam <i>Seinendan</i> .....	101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jatuhnya rezim kolonial Belanda pada 1942, dengan tiga tahun perang dan kekuasaan militer Jepang, telah mempercepat terjerumusnya masyarakat Indonesia terutama Jawa ke dalam masa kegelisahan.<sup>1</sup> Jepang menguasai daerah Hindia-Belanda awal tahun 1942.<sup>2</sup> Sebelumnya sejak tahun 1940 Jepang telah mencita-citakan menjadi pemimpin Asia Timur Raya.<sup>3</sup> Secara cepat Jepang memulai menyebarluaskan ideologi barunya *Hakko Ichiu* yang berarti Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya. Upaya Jepang tersebut dikenal dengan istilah perang suci.<sup>4</sup> Propaganda Jepang tentang kemenangan-kemenangan dan kehebatannya sejak keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia 1905 menyadarkan bahwa orang Asia bukanlah bangsa lemah dan rendah.

---

<sup>1</sup> Sutan Syahrir, *Perjuangan Kita* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur, 1995), hlm. 6.

<sup>2</sup> Usaha Jepang untuk masuk ke Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1941. Sebelum mendarat di Pulau Jawa, Jepang terlebih dahulu menguasai Tarakan Kalimantan Timur pada 10 Januari 1942, disusul dengan menguasai Balikpapan, Pontianak dan Martapura pada bulan Februari 1942. Setelah itu berhasil menaklukkan Jawa tanggal 1 Maret 1942, sedangkan serah terima dari Belanda ke pihak Jepang berlangsung pada 8 Maret 1945 di Kalijati, Subang Jawa Barat. Saat itu pihak Belanda diwakili oleh Jenderal Teer Porten dan Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachouwer sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Kumaiki Harada. Lihat Sartono Kartodirjo, Marwati J. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm.1-2.

<sup>3</sup> Bentuk pemerintahan militer Jepang bertujuan menduduki daerah *Nanyo*, memulihkan keamanan, mempercepat penugasan sumber vital bagi pertahanan nasional dan menjamin swasembada ekonomi bagi militer Jepang. Kebijakan Jepang di kawasan selatan (*Nanyo-southern area*) di dasarkan pada Konferensi Penghubung pada 20 November 1941. Pemimpin militer Jepang mulai mempertimbangkan untuk “bergerak ke selatan” untuk memperluas sampai Asia Tenggara. Daerah yang merupakan bagian daerah *Nanyo* kurang lebih mencakup semua wilayah Asia Tenggara, India dan termasuk juga Burma. H. J. Benda, J.K. Irikura, *Japanese Militari In Indonesia: Selected Document* (New Haven Yale Southeast Asia Studies, 1965), hlm. 242.

<sup>4</sup> Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV Ilmu, 1976), hlm. 195.

Jepang menjadi pusat yang berpengaruh atas beberapa negara di Asia, seperti Manchuria, Philipina, Vietnam, Thailand, Rusia dan sampai ke Indonesia.

Persemakmuran Asia Timur Raya yang dibangun Jepang tujuannya seperti yang disebutkan dalam pidato Kaisar Hirohito adalah untuk membina satu keluarga besar yang terdiri dari negara-negara merdeka, termasuk jajahan Barat.<sup>5</sup> Dari sinilah bangsa Indonesia menganggap kemerdekaan itu tampak semakin dekat dipahami pula khususnya oleh orang-orang Jawa yang masih terkait dengan ramalan Joyoboyo.<sup>6</sup>

Pendaratan pertama Jepang tanggal 1 Maret 1942 berlangsung di tiga tempat di Pulau Jawa yakni Merak Banten, Eretan Indramayu dan Kragan Rembang karena ketiga tempat tersebut merupakan pintu masuk untuk menduduki Jawa. Selanjutnya Jepang dan Belanda kemudian bertemu di Subang melakukan perjanjian serah terima. Secara cepat Jepang mulai menyesuaikan diri dengan membuat aksi-aksi propaganda guna mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia untuk memenangkan Perang Dunia II. Kedatangan tentara Jepang disambut dengan suka ria dan penuh harap agar bangsa Indonesia dapat dibantu dalam mempercepat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.<sup>7</sup> Prioritas

---

<sup>5</sup> De Jounge, *Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Belanda* (Jakarta: Kesaint Blanc, 1987), hlm. vii.

<sup>6</sup> Alasan lain yang juga ada yaitu berkembangnya kepercayaan akan kebenaran Ramalan Joyoboyo yang diyakini penduduk Jawa. Ramalan ini menyebutkan bahwa suatu ketika Jawa akan diperintah oleh orang-orang berkulit kuning yang telah mengusir kulit putih. Mereka datang dari Nusa Tembini. Pemerintahan orang-orang berkulit kuning ini hanya berumur setaun jagung, dalam pandangan rakyat orang berkulit kuning ini tidak lain adalah Jepang. Agaknya Jepang juga memanfaatkan ramalan itu dalam propaganda mereka sebelum perang. Selengkapnya baca Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 163.

<sup>7</sup> Nurdyanto, *Tentara Pembela Tanah Air di Cilacap 1943-1945*, Patra Widya Vol. 4 No.1 Maret 2003, hlm. 100, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

pemerintah Jepang di awal pendudukannya adalah menghapus segala macam unsur Barat di Indonesia. Nampak sebuah persamaan persepsi antara Indonesia dengan Jepang yaitu sama-sama ingin menghapus pengaruh dan dominasi Barat yang dirasa penghalang dan kolonialis.

Tiga setengah tahun Jepang di Indonesia bukan berarti tanpa perubahan baik itu tatanan sosial, politik, pemerintahan, ekonomi dan budaya. Jika pada masa Belanda lebih memanfaatkan priyayi sebagai “*Corner Stone*” dalam mengelola pemerintahan, maka Jepang lebih tertarik pada kiai dan ulama. Justru di zaman Jepang peranan kiai tidak lagi disingkirkan, tetapi ikut berperan aktif dalam politik dan administrasi pemerintahan.<sup>8</sup> Jepang berpendirian bahwa umat Islam merupakan *Powerful Forces* dalam menghadapi sekutu. Upaya pendekatan terhadap umat Islam diantaranya dengan diadakannya konferensi Islam untuk seluruh Jawa yang diadakan pada Agustus 1942. Jepang menyadari bahwa muslim di Indonesia bukan sesuatu yang mudah diarahkan, untuk itu menciptakan hubungan baik dengan Islam merupakan suatu hal yang lebih mendesak bagi Jepang daripada memenuhi keinginan para elite nasionalis.

Kiai dan ulama sebagai unsur dunia ketimuran dipercayai rakyat sekaligus mempunyai kekuatan tawar yang cukup tinggi. Mereka tidak hanya sebagai tokoh spiritual saja tetapi juga politik yang mewakili basis massa yang banyak dan langgeng dibandingkan pejabat desa. Satu lagi pertimbangan Jepang bahwa semangat jihad adalah ancaman menakutkan oleh karena itu

---

<sup>8</sup> Nuruozaman Shiddiqi, *Menguak Sejarah Muslim Indonesia: Suatu Kritik Metodologis* (Yogyakarta: PLP2M, 1984), hlm.94.

Jepang berusaha agar golongan kiai dan ulama tidak menjadi bumerang. Harapan Jepang bahwa semangat jihad itu bisa membantu Jepang dalam mengerahkan masa untuk melawan sekutu untuk kemenangan Jepang.

Satu bulan menduduki Jawa yaitu Maret 1942, Pemerintah militer Jepang mendirikan Kantor Urusan Agama (*Shumubu*) di Ibu Kota Jakarta<sup>9</sup> diketuai oleh Kolonel Horie Choso. Beberapa “ahli Islam” Jepang dikirim ke Jawa dan bergabung dengan *Shumubu*. Alasan pembentukan *Shumubu* adalah memanipulasi umat Islam di Indonesia agar bersikap kooperatif dan bersahabat dengan Jepang. Program kerja *Shumubu* bertema keislaman, hal ini adalah strategi Jepang dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan Islam. *Shumubu* merekrut sejumlah ahli Indonesia diantaranya Dr. Husein Djajadiningrat, R. Prijono, Raden Haji Husein Iskandar Abdullah Aidid, dan Mr. Subagio Djojowidagdo, mereka adalah bekas pegawai Kantor Urusan Pribumi zaman Belanda. Penguasa Jepang tampaknya tidak memerlukan waktu yang lama untuk memenangkan dukungan kelompok Islam. Salah satu faktor yang menguntungkan saat itu adalah sikap Islam yang anti-kolonial.

Pada Desember 1942 kepala *Shumubu* Kolonel Horie mengunjungi beberapa pesantren di Jawa. Para kiai dari pusat-pusat pendidikan diajak ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan dari pemerintah Jepang. Pada 1943 *Shumubu* juga mengadakan pelatihan penghulu dan urusan-urusan kenegaraan di Jakarta. Jelas sekali bahwa *concern* pertama adalah golongan Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Terj. Satrio Wahono dkk (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 298.

<sup>10</sup> Djoko Dwiyanto, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda Nasionalisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 46.

Jepang rupanya tahu bahwa kampanye melawan Barat dapat didukung oleh golongan Islam Indonesia.

*Shumubu* berfungsi kurang lebih seperti *Office for Native Affairs* (Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda, tetapi dalam perkembangannya *Shumubu* menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum.<sup>11</sup>

Seiring perkembangannya *Shumubu* mengalami reorganisasi, Kolonel Horei digantikan oleh Dr. Hoesein Djajaningrat sebagai pakar agama Islam sedang penasihatnya ialah Dr. Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul.<sup>12</sup> Kemudian diadakan lagi reorganisasi *Shumubu* dengan menggantikan ketua *Shumubu* oleh K.H. Hasyim Asy'ari seorang ulama dari pesantren Tebu Ireng.<sup>13</sup> Akibat baru saja keluar dari tahanan atas penolakannya menjalankan *seikerei*,<sup>14</sup> maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. Selain K.H. Hasyim Asy'ari beberapa ulama juga memiliki sikap menentang

---

<sup>11</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, hlm. 234-243. Lihat juga Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 19-20

<sup>12</sup> Ia adalah seorang terkemuka dan pendiri Muhammadiyah Sumatera Barat yang dibuang ke Jawa Barat, namun tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, maka tidak mempunyai pengaruh juga pada umat Islam

<sup>13</sup> Taufik Abdullah dkk (ed.), *Sejarah Umat Islam Indonesia* (Jakarta: MUI, 2003), hlm. 195.

<sup>14</sup> *Seikerei* atau disebut juga *Saikerei* adalah bentuk penghormatan yang dilakukan orang-orang Jepang dengan cara membungkukkan badan 90 derajat ke arah Tokyo sebagai perwujudan penghormatan terhadap kaisar Jepang. Upacara *Seikerei* ini terinspirasi oleh semangat ajaran *Shinto* yaitu ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Jepang. Ajaran ini mempercayai bahwa matahari sebagai sumber kekuatan utama yang menggerakkan kehidupan. Pada perkembangannya upacara *Seikerei* juga diterapkan oleh Jepang dimasa pendudukannya di Indonesia. Hal itu menyebabkan penolakan tercatat beberapa perlawanan diantaranya K.H Zaenal Mustafa di Pesantren Sukamanah Tasikmalaya, Jawa Barat, dan lingkungan Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Selengkapnya baca Harry J. Benda, *Matahari Terbit dan Bulan Sabit*, hlm. 154-157.

terhadap Jepang diantaranya adalah Teuku Abdul Djalil<sup>15</sup> dan K.H. Zainal Mustafa.<sup>16</sup>

Pada tahun 1944 dibuka cabang-cabang *Shumubu* yang bernama *Shumuka* di seluruh Indonesia. Pembentukan *Shumuka* diharapkan mampu mengadakan kontak yang lebih dekat dengan kantor pusat *Shumubu* di Jakarta. *Shumubu* sebagai satu-satunya wadah aspirasi umat Islam di Jawa sehingga bisa meningkatkan posisi Islam baik dalam bidang sosial-religius maupun politik terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Banten, Cirebon, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Seperti yang dikatakan Benda *Nippon's Islamic Grass Root Policy* yaitu kebijakan politik Jepang atas umat Islam untuk mengeksploitasi tokoh-tokoh muslim dan ulama.

Dalam hal pendidikan, *Shumubu* dimanfaatkan oleh Jepang terutama dalam rangka menyediakan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang. Saat itu pendidikan dan pengajaran terlantar sehingga banyak sekolah yang ditutup karena guru-guru banyak yang beralih menjadi tenaga administrasi di kantor pemerintahan.<sup>17</sup> Meskipun jumlah sekolah semakin berkurang, Jepang menetapkan kebijakan pendidikan yang terbuka bagi semua

---

<sup>15</sup> Ia seorang kepala sekolah agama terkenal di Cot Plieng, Bayu Lhoksumawe, Ia berjuang menghentikan upacara *seikerei*. Penentangan Teuku Abdul Djalil terkenal melalui pernyataannya "Mengusir Anjing dan Memasukkan Babi". Maksudnya adalah mengusir Belanda dan memasukkan penguasa baru yaitu Jepang. Ia mengibaratkan Jepang seperti Yakjuj dan Makjuj yaitu setan-setan yang merusak keyakinan Islam seraya menghidupkan kembali ingatan murid-muridnya akan kesucian mati syahid yang seperti yang tertulis dalam Hikayat Perang Sabil. Amrin Imran, *Indonesia Dalam Arus Sejarah.*, hlm. 27.

<sup>16</sup> K.H. Zainal Mustafa adalah pemimpin pondok pesantren di Sukamanah, Tasikmalaya. Ia bersikap kritis dan non-kooperatif terhadap pemerintahan Jepang terutama ketika diminta ikut dalam upacara *seikerei*, Ia satu-satunya Kiai yang tidak mengikuti perintah Jepang karena menurutnya musrik dan merusak akidah Islam. Sikap penentangannya disebarkan melalui ceramah-ceramahnya.

<sup>17</sup> Amrin Imran, *Indonesia Dalam Arus Sejarah.*, hlm. 74.

golongan.<sup>18</sup> Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam lebih lunak, sehingga ruang geraknya lebih bebas daripada Belanda.<sup>19</sup> Bahkan pemuka agama lebih diberi keleluasaan dalam mengembangkan pendidikannya. Tujuan dari pendidikan dikenal dengan *Hakko Ichiu* yaitu mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam rangka mencapai Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya<sup>20</sup> dan mendukung kebijakan penguasa.<sup>21</sup>

Bertindak sebagai kantor urusan Agama kewenangan *Shumubu* di Jawa juga terasa di dunia pendidikan madrasah. *Shumubu* berusaha memasukkan doktrin Jepang kedalam madrasah melalui kurikulum maupun lingkungan belajarnya. Pelajaran agama di madrasah diselipkan keterampilan fisik, senam (*taiso*) dan ketrampilan mengelola lahan lingkungan. Selain para murid *Shumubu* juga mempengaruhi tenaga pengajar di berbagai kota besar di Jawa

---

<sup>18</sup> Tidak lagi seperti kolonial Belanda, Jepang menunjukkan sikap bersahabat dengan membuka peluang dalam bidang pendidikan terutama sekolah. Model sekolahan disatukan tidak lagi terjadi dualisme seperti masa kolonial Belanda dalam suasana barat "*Westerse Sfeer*" diantaranya pemisahan *Hollandsch Inlandshe School (HIS)* dan *Europese Lagere School (ELS)*. Lebih lengkap baca Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta; Gramedia, 1989), hlm. 107. Hanya saja nama-nama sekolah dan tingkatannya diubah dengan bahasa Jepang.

<sup>19</sup> Sikap kontra Jepang terhadap pendidikan ditunjukkan atas tindakannya melarang lembaga pendidikan misalnya di pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari. Lebih lengkap baca Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 16.

<sup>20</sup> Arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal pada umumnya selaras dengan ideologi negara, sistem politik atau kebijaksanaan pemerintah yang menguasai lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Pada hakikatnya dunia pendidikan dijadikan sarana untuk menjepangkan penduduk dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek dilakukan melalui kursus-kursus kilat.

<sup>21</sup> Melalui pendidikan politik Jepang "mendidik" untuk bertingkah laku sebagai warga negara yang baik. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu pendidikan politik yang semula bersifat persuasif dapat berubah menjadi koersi (pemaksaan) fisik. Lihat Alfred de Grazia, *The Elements of Political Science* (New York: Alfred Knopf, 1952), hlm. 255. Arah orientasi politik yang dihasilkan pendidikan tidak selalu tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh penguasa (*the ruling elite*) umumnya. Terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pembentukan sikap dan tingkah laku politik jauh lebih kompleks dan penuh variabel. Baca juga Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hlm.65.

melalui sosialisasi programnya, agar dapat memberikan pengertian ke murid bahwa membantu Jepang merupakan tugas tanggungjawab bersama.

Dalam perjalanannya terjadi intervensi Jepang terhadap kinerja *Shumubu* di Jawa, juga mempengaruhi kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah. Kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah di Jawa mengalami perbedaan, tidak lagi diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil akan tetapi menyediakan tenaga perang terlebih penduduk Jawa sangat banyak jumlahnya. Sistem pengajaran yang sedikit pengetahuan karena sepanjang hari hanya latihan perang atau bekerja. Tujuan khususnya menyediakan tenaga perang melalui latihan militer dan fisik. Doktrin-doktrin Islam dalam madrasah disalah gunakan untuk membekali murid bermental tangguh untuk melawan kekafiran pihak sekutu. Di dalam madrasah para murid dibekali kepercayaan agama yang kuat dan dilatih keterampilan baris berbaris. Mereka tergabung dalam pasukan *Hisbullah* untuk dilatih menjadi pasukan perang yang digunakan Jepang untuk memperkuat kedudukannya. Dari sinilah dapat dilihat bahwa sistem pendidikan yang diterapkan Jepang sangat membantu terjadinya mobilitas masa.

Terjadi pergeseran peran dan fungsi madrasah dari lembaga belajar mengajar menjadi lembaga yang menyediakan pekerja perang. Para murid di madrasah disemangati dengan pengetahuan Islami yang mampu menampilkan semangat *jihad fisabilillah* yang kemudian diarahkan untuk membantu Jepang memenuhi tenaga manusia yang dipersiapkan untuk Perang Asia Timur Raya.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena berusaha menggali informasi mengenai kebijakan *Shumubu* sebagai wadah Islam di Jawa justru menggeser peran madrasah yang awalnya sebagai kaderisasi umat Islam berwawasan modern justru menjadi perajurit perang dengan semangat keislamannya untuk merealisasikan politik ekspansi Jepang menjadi penguasa Asia Timur Raya.

## **B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan adalah sebagai berikut: Secara temporal masalah yang akan dibahas antara tahun 1942 sampai 1945. Hal ini karena tahun 1942 merupakan tahun kedatangan Jepang dan pembentukan *Shumubu* pertama kali. Sedangkan tahun 1945 adalah masa akhir pendudukan Jepang. Ruang lingkup pembahasan ini hanya meliputi Jawa, meliputi daerah kota praja Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jawa menjadi sentralisasi Jepang, didukung letaknya yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana konteks masyarakat Jawa masa pendudukan Jepang 1942-1945?
2. Bagaimana kebijakan politik Jepang terhadap keagamaan Islam di Jawa 1942-1945?
3. Bagaimana kebijakan *Shumubu* dalam pendidikan dan Implikasinya terhadap madrasah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui konteks masyarakat Jawa masa pendudukan Jepang 1942-1945
2. Untuk mengetahui kebijakan politik Jepang terhadap keagamaan Islam di Jawa 1942-1945
3. Untuk mengetahui kebijakan *Shumubu* dalam pendidikan dan implikasinya terhadap madrasah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai sumbangan tertulis berupa informasi ilmiah untuk pelengkap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang kondisi umat Islam di Pulau Jawa pada zaman Jepang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang pendidikan Islam di Indonesia.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peminat dan pemerhati sejarah sekaligus sumbangsih bagi pendidikan terutama kajian tentang peran madrasah pada masa pendudukan Jepang.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Kepustakaan merupakan sumber gagasan bagi suatu penelitian, apalagi bagi penelitian yang bersifat literer. Pembahasan mengenai masalah Islam di zaman pendudukan Jepang sudah banyak dikaji oleh para peneliti, namun pembahasan spesifik mengenai realisasi politik ekspansi Jepang: kebijakan

*Shumubu* terhadap madrasah tahun 1942-1945 di Jawa, sepanjang pengetahuan penulis belum banyak dibahas.

Adapun buku yang menjadi rujukan berkaitan dengan pembahasan masa Jepang antara lain: Buku karya J.Benda yang berjudul *The Crescent and The Rising Sun: Indonesia Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, terjemahan Dhaniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980). Pembahasan buku ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang warisan kolonial Belanda, kemudian dalam bab kedua menerangkan awal mula Jepang di Indonesia meliputi konsolidasi politik Jepang terhadap umat Islam. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa adanya polarisasi serta kebijakan yang diambil umat Islam dalam menghadapi penjajahan Jepang. Pembahasan yang dipaparkan sangat mendetail, karena lebih menekankan kajiannya dari sisi bagaimana umat Islam Indonesia merespon berbagai kebijakan Jepang yang diterapkan oleh mereka.

Perbedaan pembahasan ini dengan buku karangan Benda yaitu pada titik fokus masalah yang dikaji. Benda menyajikan Islam secara keseluruhan pada masa Jepang, meliputi bentuk konsolidasi politik Jepang terhadap Islam masa awal pendudukannya. Diantaranya usaha yang dilakukan *Shumubu* untuk mencapai tujuan utama Jepang yaitu melalui pengenalan kebudayaan Jepang, pengetahuan keagamaan dengan memanfaatkan kiai dan ulama menjadi propagandis Jepang. Perbedaan dari kajian ini Benda belum menyajikan kebijakan *Shumubu* terhadap dunia pendidikan dan lebih mengulas pada

politikanya saja. Penulis lebih menekankan pada bentuk kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah yang dimanfaatkan sebagai tangan kanan pemerintah Jepang yang membantu merealisasikan politik ekspansi Jepang.

Buku kedua yang menjadi rujukan karangan B.J Boland berjudul *Pergumulan Islam di Indonesia* yang diterjemahkan oleh Safroedin Bahar, diterbitkan oleh Grafiti Press, Jakarta tahun 1985. Dalam buku ini dibahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia dan peran penuh liku-liku yang dimainkannya untuk turut mengisi kemerdekaan. Buku ini memberikan dokumentasi yang relatif lengkap tentang sejarah politik Islam di Tanah Air dan pergumulan-pergumulan yang dihadapinya di dalam kurun waktu 1945-1970. Buku ini terdiri atas empat bab, Bab I membahas kiprah dalam bidang politik (1945-1955). Bab II membahas umat Islam di tengah ketegangan yang semakin memuncak. Bab III mengupas tentang Islam dan Orde Baru (1965 dan sesudahnya). Bab IV tentang masalah-masalah politik hingga bicara relasi umat Islam dan Kristen.

Perbedaan penelitian ini dengan buku Boland terletak pada fokus objek yang diteliti. Secara luas Boland membahas mengenai Islam masa setelah kemerdekaan yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kolonialisme. Terdapat perubahan peran dari priyayi di masa Belanda ke peran kiai dan ulama di masa Jepang. Manfaat yang diberikan Jepang diantaranya adalah pembentukan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) dan pembentukan *Hizbullah*. Boland sudah menyinggung mengenai pembentukan Hisbullah akan tetapi tidak mengaitkan peran madrasah di dalamnya. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan

pada masa kolonialisme Jepang terlebih kebijakan *Shumubu* terhadap pelaksanaan madrasah dan perubahan yang terjadi di madrasah untuk mempersiapkan tenaga perang.

Ketiga yang menjadi rujukan yaitu karya Aiko Kurasawa *Politik Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* terbitan Komunitas Bambu tahun 2014. Buku ini menjelaskan bahwa terjadi perbedaan sangat tajam antara apa yang dilakukan oleh penjajah sebelumnya yaitu kolonial Belanda dengan pemerintah militer Jepang, khususnya dalam kehidupan sosial di pedesaan Jawa. Kebijakan Jepang yang militerisme itu merupakan strategi politik Jepang untuk menghasilkan nilai budaya dan kepercayaan yang baru namun menurut Aiko sendiri bahwa kekuasaan Jepang memang tidak membawa perubahan, tetapi justru merangsang jiwa nasionalis yang pada dasarnya sudah ada di hati rakyat Indonesia. Buku ini penting untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat Indonesia saat itu dimana semua kebijakan Jepang menyisakan penderitaan untuk rakyat.

Selain itu juga pola mobilisasi Jepang dengan pembentukan *Shumubu*, peranannya serta kebijakannya. Aiko Kurasawa juga menyinggung mengenai mobilisasi penduduk bidang pendidikan sekolah secara umum. Akan tetapi belum sampai pada implikasi kebijakan *Shumubu* terhadap dunia pendidikan khususnya madrasah. Disinilah letak perbedaan penulis dengan Aiko Kurasawa, penulis ingin melihat lebih jauh bentuk kebijakan Jepang melalui *Shumubu* di dunia madrasah dalam pengerahan tenaga rakyat untuk kemenangan perang. Perlunya strategi politik yang di tempuh Jepang untuk

mengambil hati rakyat, salah satunya adalah pendekatan ulama dan dilibatkannya para ulama dalam perpolitikan ala Jepang.

### **E. Landasan Teori**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah terjadi dimasa lalu.<sup>22</sup> Peristiwa sejarah mencakup segala hal yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan dirasakan dan dialami oleh manusia.<sup>23</sup> Melalui penelitian sejarah diharapkan dapat direkonstruksi masa lalu dan juga dipecahkan masalah sosial sesuai perkembangan ilmu sejarah.<sup>24</sup> Dalam hal ini menghasilkan sebuah penjelasan mengenai realisasi politik ekspansi Jepang studi kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah di Jawa 1942-1945.

Realisasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian pelaksanaan sesuatu hingga menjadi kenyataan.<sup>25</sup> Realisasi politik sebagai upaya mewujudkan apa yang selama ini diharapkan oleh pemerintahan Jepang yaitu Persemakmuran Asia Timur Raya yang sudah dimulai sejak 1941. Ekspansi menurut artinya yaitu perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian/seluruh wilayah negara lain. Saat Perang Dunia II beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia menjadi sasaran politik ekspansi Jepang.<sup>26</sup> Ekspansi politik yang dilaksanakan Jepang tidak terlepas

---

<sup>22</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 5.

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 17.

<sup>24</sup> Sanusi, *Penyajian Sejarah dan Pemahaman Ilmu Sejarah*, Dokumen Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta 1985 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 14.

<sup>25</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi.3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 958.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 313.

dari kebijakan politiknya yang bercita-cita membangun Imperium di Asia Timur Raya.

*Shumubu* yaitu badan/kantor yang mengurus masalah keagamaan pada masa pendudukan Jepang. Tujuan pembentukan *Shumubu* pada 1943 adalah sebagai wadah umat Islam Indonesia agar dapat dikendalikan sekaligus dimanfaatkan sebagai tangan kanan Jepang dalam melakukan pendekatan terhadap umat Islam. Kebijakan *Shumubu* meliputi segala bentuk konsolidasi terhadap umat Islam diantaranya dengan mengadakan pelatihan terhadap kiai agar muncul semangat pro Jepang. Selain itu memanfaatkan pemahaman-pemahaman Islam untuk diarahkan memenuhi bantuan tenaga perang Jepang. Salah satu kebijakan *Shumubu* yaitu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam yang diwadai dalam madrasah.

Kebijakan (*policy*) adalah serangkaian putusan/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok politik pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>27</sup> Kebijakan memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten.<sup>28</sup> Menurut Nevil Johnson istilah kebijakan lebih sering digunakan dengan tindakan pemerintah atau negara, maka seringkali kebijakan diartikan sebagai tindakan politik.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Supandi dan Ahmad Sanusi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan* (Jakarta: Depdikbud, 1998), hlm. 11

<sup>28</sup> Lebih lengkap baca Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 4-7.

<sup>29</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 3.

Kebijakan Jepang meliputi kepandaian/kemahiran, kebijaksanaan dan siasat mengenai pemerintahan suatu negara terhadap negara lain.<sup>30</sup> Kebijakan yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah keseluruhan komponen pemerintah Jepang yang memiliki legitimasi dan kekuasaan untuk membuat kebijakan negara yaitu upaya Jepang dengan membentuk *Shumubu*, serta sepak terjang *Shumubu* dalam menentukan kebijakan-kebijakan terutama bagi keberlangsungan madrasah.

Kebijakan politik adalah sistem konsep resmi yang menjadi landasan atau pedoman perilaku (dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak) politik negara.<sup>31</sup> Semua kebijakan Jepang itu merupakan alternatif yang diambil mengenai cita-cita ideal yang rasional, prioritas dan sesuai kaidah konstitusi.<sup>32</sup> Pelaksanaan strategi politik Jepang untuk mewujudkan kemenangan dan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan memanfaatkan *Shumubu* melalui kebijakan-kebijakannya.

Untuk mengkaji studi kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah sebagai realisasi politik ekspansi Jepang, penulis menggunakan teori hegemoni. Hegemoni adalah gagasan yang sentral dan paling orisinal dalam filsafat dan teori sosial Gramsci.<sup>33</sup> Hegemoni dalam prakteknya di Yunani diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (polis). Dalam pengertian jaman ini hegemoni menunjukkan sebuah

---

<sup>30</sup> Rumlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik.*, hlm. 905.

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat* (Bandung: Balai Pustaka, 2008), hlm. 215.

<sup>32</sup> Noeng Muhajir, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1992), hlm. 39.

<sup>33</sup> Robert Bocoock, *Pengantar Kompeherensif untuk Memahami Hegemoni* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 15.

kepemimpinan dari suatu negara terhadap negara-negara yang lain yang berhubungan secara longgar maupun ketat terintegrasi dalam negara “pemimpin”.<sup>34</sup> Dalam konteks ini politik internasional misalnya pada periode Jepang ingin mewujudkan Imperium di Asia Timur Raya dengan mengekspansi ke berbagai wilayah tetangga termasuk Indonesia, ekspansi tersebut sebagai perang Asia Timur Raya agar hegemoni Jepang mengakar di dunia Timur.

Teori hegemoni cukup menonjol sebagai salah satu studi pada awal 1940-an. Setelah hancurnya dunia, meningkatnya kediktatoran Eropa dan Perang Dunia II. Gramsci berbicara tentang pandangan umum tentang negara (*general nation of the state*) di dalamnya terdapat unsur masyarakat sipil. Gramsci menggunakan konsep hegemoni sesungguhnya untuk menjelaskan suatu “Negara Modern” yang berkembang dalam masyarakat modern.<sup>35</sup> Negara memerlukan pemahaman yang baik tentang bagaimana organisasi yang demokratis dapat berfungsi secara efektif. Dalam konteks ini upaya yang dilakukan Jepang sebagai negara induk yaitu dengan membentuk organisasi bawahan seperti *Shumubu*.

Di bidang superstruktur Gramsci menggunakan istilah dominasi langsung (*direct domination*) yang akan berdampak bahwa ada sebuah dominasi tak langsung dalam masyarakat sipil. Jepang termasuk ke dalam negara modern yang berkeinginan memperluas hegemoni negaranya ke luar negara induk. Jepang menggunakan hegemoni langsung yaitu dengan mengambil alih

---

<sup>34</sup> Nezar Patria, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 116.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

pasukan secara langsung dan berdampak pada kontrol pemerintah sipil yang kurang dan dialihkan pada pemerintah militer. Negara terdiri atas sarana kekerasan (polisi dan militer) di suatu wilayah tertentu, bersama dengan pelbagai birokrasi yang didanai oleh negara (pamong praja, lembaga hukum, kesejahteraan dan pendidikan). Komponen masyarakat sipil yang termasuk ke dalam definisi ini adalah lembaga dan organisasi religius yang tidak termasuk ke dalam organisasi religius yang didanai dan dikontrol oleh negara.<sup>36</sup>

Hegemoni muncul sebuah konsep baru mengenai negara, yakni konsep negara integral atau negara yang diperluas.<sup>37</sup> Negara integral merupakan hegemoni yang dilapisi dengan selubung berupa kekuasaan koersi hegemoni, jadi negara integral merupakan masyarakat politik ditambah masyarakat sipil. Negara integral mempunyai dua aspek, *Pertama*, alat kekerasan (*mean of coercion*). Alat kekerasan terdiri dari alat-alat paksa dan represi negara sementara, alat pendirian kepemimpinan hegemoni merujuk pada institusi dalam formasi sosial. *Kedua*, alat penegakan kepemimpinan hegemoni (*means of establishing hegemonic leadership*) seperti pendidikan, agama, media dan lain-lain. Negara integral bisa diartikan juga hegemoni yang dilindungi aparat kekerasan. Negara (masyarakat politik) mempunyai unsur-unsur kediktatoran, aparat pemaksaan (polisi, administrasi, birokrasi), pemerintahan (negara dalam arti sempit), negara sebagai aparat kekuasaan, dominasi. Sedangkan masyarakat sipil memiliki unsur hegemoni, aparat hegemoni (kebudayaan, politik, ekonomi), negara sebagai organiser persetujuan, kepemimpinan. Dalam

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

pemahaman sempit kepemimpinan mempunyai dua skata kunci yaitu pengaruh dan otoritas.<sup>38</sup>

Menurut Mochtar Pabottinggi bahwa Gramsci membedakan konsep hegemoni dengan konsep “kekuatan” (*forces*). Bagi Gramsci jika kekuatan meliputi penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, maka hegemoni meliputi perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” rakyat Indonesia terhadap penguasa.<sup>39</sup> Perumusan konsep hegemoni Jepang di Jawa ditekankan pada dominasi politik melalui organisasi buatan Jepang yang dipandang benar secara moral dan intelektual. Teori hegemoni digunakan untuk mengetahui sejauh mana usaha Jepang menjadikan Jawa sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan Perang Asia Timur Raya, kebijakan politik Jepang memobilisasi umat Islam di Jawa salah satunya dengan pembentukan organisasi keagamaan yaitu *Shumubu*. Dalam implikasinya hegemoni ditujukan untuk mengetahui usaha-usaha Jepang memobilisasi masyarakat Jawa melalui berbagai kebijakan.

Selain menggunakan teori hegemoni, penulis juga mengaitkannya dengan penggunaan teori kebijakan politik. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam pelaksanaannya tentunya mengalami hambatan

---

<sup>38</sup> Mochtar Pabottinggi, *Islam antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan-Muslim* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 216.

<sup>39</sup> Salah satu manifestasi terkuat dari hegemoni kultural-ideologis ini adalah diskursus Barat yang disebut *orientalisme*, yang kaitan politik/ideologisnya dengan Barat disampaikan secara jelas oleh Edward Said dalam karyanya *Orientalism* (1978). Hegemonilah yang memberi Orientaslisme daya tahan serta kekuatan. Edward Said, *Orientalism* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Selengkapnya baca Mochtar Pabottinggi, *Islam: Antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan-Muslim.*, hlm. 217-225.

rintangan dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan sasaran dengan maksud tertentu. Kebijakan politik yang diambil oleh seorang penguasa merupakan bagian dari sebuah keputusan politik. Sedangkan keputusan politik ialah keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan David Easton mengenai pengertian politik mencakup segala aktivitas yang berpengaruh terhadap kebijakan yang berwibawa dan berkuasa yang diterima oleh suatu masyarakat.<sup>41</sup> Beberapa hal yang menjadi patokan dalam sebuah proses pengambilan keputusan politik misalnya ideologi dan konstitusi, Undang-Undang, Anggaran dan Sumber Daya Manusia, efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan agama.<sup>42</sup> Berbagai pertimbangan tersebut akan menimbulkan alternatif dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan dapat dipahami sebagai fenomena politik yang dimaknai sebagai pola distribusi kekuasaan. Kebijakan kolonial Jepang terhadap umat Islam merupakan proses politik. Pola distribusi ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan agama. Oleh karena itu penelitian ini tidak hanya ditekankan pada aspek politik saja tetapi juga aspek non politik yang juga mempengaruhi terbentuknya kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Pada kenyataannya kebijakan politik sebuah negara sangat dipengaruhi oleh ideologi penguasa, dengan ideologi dapat menimbulkan keyakinan yang penuh semangat dan bertekad mengubah cara hidup. Dalam melaksanakan kebijakan politik negara memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang

---

<sup>40</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 190.

<sup>41</sup> Ahmad Fikri, *Menjadi Politisi Ekstra Parleментар* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 13.

<sup>42</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik.*, hlm. 190.

dapat digunakan untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dengan cara yang bersifat persuasif bahkan pemaksaan dalam menentukan tujuan tersebut.<sup>43</sup> Kebijakan politik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah dan membawa dampak terhadap masyarakat disekitarnya. Penyusunan kebijakan politik meliputi lima rangkaian proses seperti: penentuan agenda, perumusan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi kebijakan.<sup>44</sup> Dalam hal ini kebijakan politik merupakan serangkaian interaksi yang dilakukan *Shumubu* terhadap umat Islam di Jawa.

Kebijakan Jepang terhadap *Shumubu* juga mengarah pada pengontrolan terhadap gerak umat Islam agar tunduk terhadap penjajah dengan melibatkan pemimpin agama/ulama Islam di dalamnya. Dengan cara menaati kebijakan *Shubumu* yang terlebih dahulu diarahkan sebagai realisasi atas politik ekspansi Jepang yang dijalankan saat itu. Teori kebijakan politik untuk mengetahui peranan *Shumubu* dalam bidang politik, serta sepak terjangnya dalam menyuarakan maksud Jepang kepada rakyat. Kebijakan *Shumubu* dalam dunia pendidikan madrasah di Jawa yang dipolitisasi oleh Jepang sehingga menimbulkan dinamika politik di dalamnya. Oleh karena itu pergeseran fungsi madrasah di zaman Jepang juga menjadi akibat kebijakan *Shumubu*.

---

<sup>43</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.8.

<sup>44</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2014), hlm. 79.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berusaha mengetahui realisasi politik ekspansi Jepang kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah, meliputi ekspansi, strategi politik Jepang, kebijakan politik Jepang, dinamika yang terjadi ditubuh *Shumubu* yang berdampak pada pelaksanaan pendidikan madrasah. Guna mendapatkan deskripsi yang jelas dan analisis kritis sehingga didapatkan pemahaman yang kompeherensif, penulis menggunakan pendekatan sejarah dan politik. Pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah data yang relevan. Mencakup standar/tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti dan apa yang disampingkan.<sup>45</sup> Pendekatan sejarah digunakan dalam mengkaji strategi politik Jepang, dinamika yang terjadi ditubuh *Shumubu* dan kebijakan politik *Shumubu* terhadap madrasah sehingga akan mendapatkan pemahaman secara kompleks.

Selain menggunakan pendekatan sejarah, penulis juga menggunakan pendekatan politik,<sup>46</sup> dimana setiap peristiwa sejarah identik dengan politik. Pada mulanya politik adalah tulang punggung sejarah (*politics is the backbone of history*).<sup>47</sup> Pendekatan politik mengkaji gejala politik yang berimbas pada kekuasaan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan kultural ditambah dengan dipengaruhi oleh pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Sistem politik

---

<sup>45</sup> Miriam Budiharjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 56.

<sup>46</sup> Definisi politik pada umumnya menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala masyarakat seperti pengaruh dan kekuasaan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala masyarakat seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, budaya politik, sosialisasi politik dan sebagainya.

<sup>47</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 174.

merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Sejarah politik di sini bukan semata-mata menulis mengenai politik, tetapi mengenai kekuasaan pada umumnya.<sup>48</sup> Kekuasaan tidak hanya milik pemerintah dan negara akan tetapi setiap insitusi dan organisasi. Penulis ingin menggunakan pendekatan sejarah politik untuk mengkaji lebih jauh sejarah politik pada tingkat organisasi melalui faktor budaya dan ideologi. Politik diartikan sebagai distribusi kekuasaan maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik harus dipelajari tentang hakikat dan tujuan dari sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola perilaku individu dan kelompok yang mampu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan sosial yang meliputi partai politik, kelompok *interest*, komunikasi dan birokrasi.<sup>49</sup> Pendekatan sejarah politik ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk aktifitas pergerakan politik yang dilakukan Jepang untuk merealisasikan kebijakan Jepang di Jawa. Kiranya model pendekatan inilah yang paling mudah penulis jangkau untuk menjawab pertanyaan politik yang belum tuntas dengan menggunakan sumber yang diperoleh. Selain itu

---

<sup>48</sup> Makna kekuasaan sangatlah banyak diantaranya kekuasaan untuk melakukan tawar-menawar (*bargaining power*), kekuasaan dalam bentuk pengawasan (*power as control*), kekuasaan dalam bentuk paksaan (*power as coercion*), kekuasaan dari hak milik (*power of ownership*), kekuasaan pendidikan dan ideologi, kekuasaan pemerintah dan lain sebagainya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari seorang aktor atau kelas aktor untuk menggerakkan sumber dan melaksanakan kegiatan pengawasan dalam bidang tertentu dari kegiatan sosial. Selengkapnya lihat Tom R. Burn, dkk, *Manusia Keputusan Masyarakat Teori Dinamika Antara Aktor dan Sistem untuk Ilmuan Sosial* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hlm. 185-187.

<sup>49</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 18.

juga mengetahui sepak terjang lembaga-lembaga politik bentukan Jepang serta manuver-manuver yang dilakukan.

## F. Metode Penelitian

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu yang terikat pada prosedur ilmiah.<sup>50</sup> Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode dalam menghimpun data sampai menyajikan dalam bentuk cerita ilmiah. Metode adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Metode juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian guna memperoleh fakta-fakta dalam rangka mewujudkan kebenaran.<sup>51</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu suatu proses menguji menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau guna menemukan data agar menjadi suatu hal yang dapat dipercaya.<sup>52</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan judul. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan bertumpu pada empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>53</sup> Keempat langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1992), hlm. 29.

<sup>51</sup> Mardalis, *Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.

<sup>52</sup> Louis Gootschalk, *Understanding History: a Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.32.

<sup>53</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 54.

a. Pengumpulan sumber atau heuristik

Heuristik yaitu mengumpulkan data sejarah yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Sumber berdasarkan penyampaiannya terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber terdekat dengan waktu dan tempat dari suatu peristiwa yang dikaji dari bukti sejaman. Data yang dijadikan sebagai acuan pertama dalam sebuah penelitian diperoleh melalui pelaku atau saksi. Sedangkan sumber sekunder adalah apa yang ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama. Sumber kedua ini apabila dikutip akan menjadi sumber ketiga dan seterusnya. Sumber sekunder bisa berupa catatan atau komentar dari orang diluar buku utama yang bisa dijadikan sumber penunjang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder, hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber primer. Pengumpulan sumber diperoleh dari perpustakaan atau penelitian perpustakaan.<sup>54</sup> Penelitian ini bersifat literatur, maka proses pengumpulan data dilakukan dengan bahan dokumen melalui pencarian buletin, surat, arsip, surat kabar, *paper*, majalah, buku-buku dan sebagainya. Pencarian sumber dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan Pascasarjana, perpustakaan Kolose Ignatius, *Library Center* Yogyakarta, Badan Arsip DIY, perpustakaan DIY, Kantor Arsip Pakualaman, Monumen Pers Surakarta, Museum Radya Pustaka Surakarta, Badan Arsip Daerah

---

<sup>54</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 94.

Surakarta, Museum Ronggowarsito Semarang dan Badan Arsip Daerah Semarang .

Sumber data yang bersifat sekunder diperoleh dalam bentuk data kepustakaan dari orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap studi Islam zaman kolonial seperti Aqib Suminto, Harry J. Benda, Aiko Kurasawa, B.J Bolland, Ben Anderson dan lain sebagainya.

b. Kritik sumber atau verifikasi data

Verifikasi data dilakukan sebagai proses pengujian kebenaran data (kritik) dalam berbagai kategorinya yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan sumber. Tujuan dari kritik adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta sejarah. Dalam hal ini dilakukan apakah data itu akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diharapkan dapat diperoleh data yang valid dan kredibel.<sup>55</sup> Berdasarkan data yang telah didapatkan langkah kemudian adalah melakukan kritik baik itu intern maupun ektern.

Kritik intern dilakukan dengan menganalisa dan menjabarkan isi yang terdapat dalam data tersebut atau dengan menguji keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas). Sedangkan untuk kritik intern penulis melakukan kritik mengenai keaslian arsip yang diperoleh dari Balai Arsip di Istana Pakualaman. Akan tetapi data yang tertuang dalam sumber lain seperti buku, bahkan lebih jelas dan rinci.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

Sedangkan kritik ektern bertujuan untuk mengetahui kesahihan sumber. Caranya dengan membandingkan data satu dengan lainnya dalam rangka mencari otentitas sumber dengan mengkaji dan menguji bagian-bagian fisik.<sup>56</sup> dengan cara meninjau pengarang tulisan dan sumber-sumber yang digunakan dalam setiap sumber yang diperoleh. Penulis melakukan kritik terhadap salah satu data yang menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama. Karena ejaannya kurang jelas maka data yang tertuang dalam sumber ini penulis gunakan sebagai referensi pelengkap bagi data yang lain serta memperkuat data yang ada.

Data-data yang didapat akan diverifikasi dengan harapan diperoleh data yang validitasnya cukup diakui. Proses ini mencakup juga komparasi sumber data antara satu dengan lainnya yang mungkin akan berbeda atau mendukung. Berdasarkan data yang dikritik tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menyeleksi data yang ada sehingga menghasilkan fakta.

c. Interpretasi atau penafsiran

Interpretasi adalah tahapan menafsirkan atau analisis sejarah. Secara terminologi analisis berarti menguraikan, berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan, walaupun keduanya dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi.<sup>57</sup> Interpretasi dibagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Tahap ini juga terkait dengan proses menguraikan data sejarah yaitu dengan menganalisa segala peristiwa yang sesuai dengan pokok permasalahan dan kemudian menyatukan fakta-fakta yang didapatkan

---

49. <sup>56</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.

<sup>57</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 64.

sehingga memperoleh penjelasan tentang masalah sejarah yang diteliti tersebut.

d. Historiografi

Tahapan ini adalah tahap terakhir dari beberapa tahapan dalam penelitian sejarah. Dalam hal ini mencakup cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.<sup>58</sup> Pada tahap ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal (perencanaan), sampai akhir (penarikan kesimpulan). Dalam proses ini penyajian disesuaikan dengan sistematika baik dalam tulisan maupun pembahasannya.

Dalam konteks ini penulis mendeskripsikan realisasi politik ekspansi Jepang dengan cara menghubungkan peristiwa Perang Dunia II/ Perang Pasifik dengan kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia terutama dalam pembentukan *Shumubu* dan dampaknya terhadap pendidikan di madrasah, sehingga diperoleh deskripsi yang sistematis dan kronologis sesuai dengan kaidah ilmiah penulisan sejarah.

**G. Sistematika Pembahasan.**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan garis besar dari keseluruhan penelitian dalam bentuk sistematika pembahasan. Adapun terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

**Bab Pertama**, menjelaskan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian.

**Bab Dua**, menjelaskan bagaimana pendudukan Jepang dalam konteks masyarakat Jawa 1942-1945. Dalam bab ini penulis menggambarkan latar belakang historis penjajahan Jepang di Indonesia, konteks sosial masyarakat Jawa dan konteks sosial keagamaan masyarakat di Jawa.

**Bab Tiga**, menguraikan bagaimana kebijakan Politik Jepang terhadap keagamaan Islam di Jawa. Dalam bab ini penulis menjelaskan kebijakan politik Jepang, meliputi konsep politik Jepang dan kebijakan politik Islam Jepang. Selain itu penulis juga menjelaskan tentang pembentukan *Shumubu* baik itu tugas, keanggotaan, kebijakan *Shumubu* serta menjelaskan sosialisasi program yang dijalankan oleh masing-masing pemimpin *Shumubu*. Pada bab ini dibahas pula pembentukan *Shumuka* yaitu seksi agama di tingkat karesidenan.

**Bab Empat**, menguraikan bagaimana kebijakan *Shumubu* dalam pendidikan Islam di Jawa. Dalam bab ini penulis menggambarkan pendidikan Islam di masa Jepang baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Kebijakan *Shumubu* terhadap pendidikan Islam terutama madrasah dan Implikasi kebijakan *Shumubu* terhadap madrasah di Jawa.

**Bab Lima**, berisikan kesimpulan peneliti dalam pembahasan, selain itu juga kritik, saran dan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Realisasi Politik Ekspansi Jepang: Studi Kebijakan *Shumubu* terhadap Madrasah tahun 1942-1945 di Jawa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedatangan Jepang di Jawa pada 1942 membawa perubahan dalam konteks masyarakat Jawa baik itu sosial-politik dan sosial-keagamaan. Perluasan pengaruh kekuasaan Jepang di Jawa dijalankan melalui kebijakan terhadap keagamaan Islam di Jawa. Hal tersebut dibangun dalam rangka mendapatkan dukungan dari umat Islam mengacu pada kebijakan politik Jepang. Kebijakan politik Jepang yaitu membubarkan seluruh aktifitas politik peninggalan Belanda, dan melarang berdirinya organisasi politik melalui Undang-Undang No. 3 tanggal 20 April 1942. Kebijakan politik Jepang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh Barat. Jepang ingin memunculkan stigma positif dan berniat melepaskan Jawa dari penjajahan Belanda selanjutnya menjadikan Jawa bagian dari perluasan hegemoni Jepang. Usaha dalam rangka me-*Nipon*-kan Indonesia mengundang simpati masyarakat, loyalitas masyarakat Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk membangun imperium Jepang di Asia Timur Raya. Tujuan Jepang adalah untuk pengerahan massa menyambut Perang Asia Timur Raya. Cara yang ditempuh Jepang melalui pertama, pendirian

*sedebu* yang bertujuan untuk menyebarkan propaganda pada rakyat Jawa agar mendukung upaya perang Jepang. Kedua, pendirian Putera untuk memobilisasi rakyat Indonesia dengan memanfaatkan kharisma tokoh-tokoh nasionalis agar mau dikerahkan demi kepentingan bala tentara Jepang. Ketiga melalui *Jawa Hokokai*, Jepang menanamkan prinsip-prinsip pengorbanan diri, kesetiaan, dan dedikasi serta memanfaatkan tenaga mereka demi kelangsungan perang.

2. Upaya Jepang memobilisasi umat Islam di bidang keagamaan Islam ditandai dengan pendirian *Shumubu*. Bagi Jepang *Shumubu* mengandung arti untuk mengawasi gerak umat Islam di Jawa tanpa adanya kecurigaan, serta sebagai alat propaganda untuk mendapat simpati dan bantuan umat Islam untuk kepentingan Jepang. Dalam melakukan kontrol *Shumubu* dibantu oleh *Shumuka* di tingkat daerah sehingga memudahkan Jepang melakukan kontrol terhadap Islam di daerah. Tujuan pembentukan *Shumuka* yaitu mengadakan kontak yang lebih intensif antara pusat dan daerah. Kedua, memberikan pengawasan mengenai masalah-masalah Islam di Jawa misalnya perkawinan Islam dan pengumpulan derma-derma agama terutama bupati dan penghulu. Tugas dari *Shumuka* adalah menjalankan berbagai urusan dan berfungsi sebagai penasehat umum dalam masalah agama termasuk mengangkat pegawai dan mengawasi buku-buku agama. Selain keagamaan *Shumubu* juga menangani bidang pendidikan terutama pendidikan Islam di bawah departemen Pengajaran. Menurut Jepang pendidikan agama memang penting dalam menyongsong

kemajuan zaman akan tetapi harus menyelami kebudayaan Nippon agar kaum muda akan bersedia bekerja bagi Asia Timur Raya.

3. Perkembangan madrasah dimulai dari lingkungan pesantren yang menyelenggarakan sekolah formal. Madrasah pada zaman itu berfungsi mengembangkan ajaran Islam dikalangan remaja. *Shumubu* diwajibkan untuk memberikan pengarahan dan pedoman kepada madrasah. Tujuannya untuk meninjau keadaan dan perkembangan Islam dalam pendidikan. Harapannya murid-murid akan patuh dengan agama sehingga lebih mudah membantu Jepang atas nama agama. Melalui pendidikan mentalitas dan cara berpikir diubah dan dialihkan, dari mentalitas Eropa kepada “Alam Pikiran Dai Nippon” dengan memasukkan doktrin Asia Timur Raya-nya. Pengelolaan madrasah juga berada di bawah tanggungjawab *Shumubu*. *Shumubu* sangat aktif mempengaruhi madrasah dengan membentuk murid dan menanamkan semangat *Bushido*. Di lingkungan madrasah pengetahuan tentang agama mulai diarahkan untuk kepentingan penguasa. Misalnya ikut serta membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya adalah suatu perjuangan jihad dan rasa cinta kepada tanah air. Tenaga pengajar di madrasah terdiri dari guru-guru agama di pondok pesantren dan guru yang didatangkan dari luar untuk mengampu matapelajaran umum. Demi mensukseskan tujuannya, Jepang mengadakan pelatihan dan kursus bagi guru-guru di madrasah. Pada April 1944 diselenggarakan “Latihan Goroe Bagian II”, tujuannya membangkitkan semangat pro Jepang yang nantinya ditularkan kepada murid-muridnya

Guru madrasah berdakwah bukan tentang agama, melainkan semangat bagaimana memperbesar produksi atau bahan yang diperlukan perang Jepang. Pengetahuan mengenai *jihad fi sabilillah* diarahkan untuk membantu kemenangan Jepang. Termasuk semangat *jihad* Islam di kalangan murid-murid madrasah dibelokkan untuk mengabdikan kepada Jepang. Melalui “Perang Suci” Jepang mempropagandakan Islam melawan sekutu yang dianggap musuh Islam termasuk mempergunakan murid-murid madrasah untuk memobilisasi masa. Para murid di madrasah untuk ikut serta dalam kegiatan semi militer dan militer yang dibentuk oleh Jepang. Salah satunya melalui pembentukan pasukan *Hisbullah, Sabilillah, Seinendan* dan pembentukan Peta. Pembentukan lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang sesuai dengan perintah Allah, begitulah Islam terpaksa ditafsirkan sehingga memaksa madrasah dan pesantren juga mengambil andil yang sangat besar bagi pengkaderan semangat nasionalisme yang dipupuk atas dasar agama. Sentimen-sentimen agama seperti perang jihad sebagai alat propaganda yang paling ampuh untuk mempengaruhi pemuda. Pembentukan *Hisbullah, Sabilillah, Seinendan* dan Peta justru membuat pemuda Indonesia dilengkapi semangat kebangsaan Indonesia, pemuda Indonesia semakin militan dan dinamis dalam mengantarkan ke gerbang kemerdekaan Indonesia.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait kebijakan politik Jepang di Jawa dapat mengkaji melalui berbagai sudut pandang, tidak hanya politik dan keagamaan akan tetapi sosial, ekonomi dan budaya juga perlu dikembangkan.
2. Sebagai penguat kajian politik Jepang di Jawa perlu ditambahkan dengan penggunaan sumber primer disamping sumber sekunder.
3. Pengaruh politik Jepang terhadap *Shumubu* dan implikasinya terhadap madrasah dapat menjadi bahan kajian yang menarik bahwa Jepang mempunyai andil terhadap pendidikan Islam di Jawa. Unsur-unsur positif yang ditularkan Jepang membawa perubahan pendidikan madrasah.
4. Penulis juga menyarankan kepada peneliti berikutnya dapat mengkaji secara objektif mengenai sepak terjang Departemen Agama pada masa Jepang serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, terutama pada bidang pendidikan Islam khususnya madrasah dengan tujuan untuk lebih memperkaya khasanah intelektual Islam di Indonesia.

Demikian kesimpulan serta saran-saran dari penulis, semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A.B. Lopian, *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*,
- Aboebakar, 1957, *Sejarah Hidup K.H.A Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A Wahid Hasyim.
- Aboebakar, *Sejarah Hidup Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*,
- Ahmad Fikri, 1999, *Menjadi Politisi Ekstra Parlementer*, Yogyakarta: LkiS.
- Ahmad Mansyur Suryanegara, 1998, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Ahmad Mansyur Suryanegara, 2008, *Ummat Islam Indonesia dalam Perspektif Sejarah sebuah analogi Kebangkitan Islam dalam Pembahasan*, Yogyakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Ahmad Syafi'i Maarif, 1996, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aiko Kurasawa, 2015, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- Akira Nagazumi, 1988, *Pemberontakan Indonesia di Masa Jepang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesi.
- Alfred de Grazia, 1952, *The Elements of Political Science*, New York: Alfred Knopt.
- Alisyahbana, 1957, *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Rakyat.

- Amin Imran, dkk, 2012, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, Jilid.6, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Anton Haryono, 1984, *Militansi Pemuda Pejuang Bersenjata R.I dari pendudukan Menuju ke Pertemuran: Politik Penguasa dan Siasat Pemuda Nasionalisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Arifin Bey, 1987, *Pendudukan Jepang Di Indonesia: Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumen Pemerintahan Belanda*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Armai Arief, 2007, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press.
- Aqib Suminto, 1983, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken*, Jakarta: LP3ES.
- Azyumardi Azra, 1999, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Wacana Ilmu.
- B. J. Boland, 1985, *Pergerumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press.
- Ben Aderson, 1988, *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Beni Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Burhanudin Harahap, *Bung Hatta Dalam Dwi Tunggal*, dalam *Bung Hatta: Pribadinya Dalam Kenangan*,
- Dasman Djamaluddin, 1992, *Butir-Butir Padi: B.M Diah Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman*, Jakarta: Pustaka Merdeka.
- Dawam Raharjo, 1974, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES.
- De Jounge, 1987, *Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Belanda*, Jakarta: Kesaint Blanc.

- Deliar Noer, 1983, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*.
- Deliar Noer, 1991, *Gerakan Modern Islam 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Departemen Agama RI, 2012, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim.
- Djoko Dwiyanto, 1984, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda Nasionalisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Djumhur, 1976, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu.
- Dudung Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dudung Abdurrahman, 2011, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak.
- E.K.M Masinambow, 1980, *Kenangan Pamongpraja Zaman Kolonial*. Prisma 8 Agustus.
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, 2008, *Hegemoni dan Strategi Sosialis*, Yogyakarta: Resist Book.
- Eto Shinkichi, 1981, *Pembentukan Politik Luar Negeri Jepang Bunga Rampai Kekuatan yang Membisu: Kepribadian Jepang dan Peranan Jepang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Frederick, 1986, *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1986.

- Frederick, 1989, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi di Indonesia Surabaya 1926-1946*, Jakarta: Gramedia.
- G.A. Ohorella, 1992, *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- G.P.H. Djatikusumo, 1986, *Permulaan Terbentuknya Suatu Negara dalam Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- G. Moedjanto, 1998, *Indonesia Abad ke-20: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, Yogyakarta: Kanisius.
- George D. Larson, 1990, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Haidar Putra Daulay, 2009, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Renika Cipta.
- Harry J Benda, 1980, *The Crescent and Rising Sun: Islam Indonesia Under Japanese Occupation, 1942-1945*, diterj. Dhaniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harry. J. Benda, J.K. Irikura, 1965, *Japanese Militari In Indonesia: Selected Document*, New Haven Yale Southeast Asia Studies.
- Harsono Tjokroaminoto, 1983, *Menelusuri Jejak Ayahku*, Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Hasbullah, 1996, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hisbaron Muryantoro. 1994, *Klaten Pada Saat Revolusi 1945-1949*, dalam laporan penelitian Jarah Nitra, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Husni Rahmi, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos.
- I Wangsa Widjaja dan M.F. Swasono, 1981, *Kumpulan Pidato: Dari Tahun 1942-1949*, Jakarta: Yayasan Idayu.
- James C. Scott, 1976, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*: New Haven: Yale University Press.
- Joost Cote, 2004, *Recalling The Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial*, Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Joyce C. Lebra, 1988, *Tentara Gemblengan Jepang*, Jakarta: CV. Muliasari.
- Kahin, Audrey, 1990, *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti Press.
- Karel A. Steenbrink, 1986, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.
- Ken' Ichi Goto, 1998, *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 2003, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo, 1992, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Locher-Scholten (ed), 1987, *Beelden van Japan in het vooroorlogse Netherlands-Indie Resulten van een doctoral werkcollege*, Leiden.
- Louis Gootschalk, 1986, *Understanding History: a Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press.

- M.C. Rikclefs, 1998, *A History of Modern Indonesia* terj. Dharmo Hadiwijoyo, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- M.C. Rikclefs, 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Terj. Satrio Wahono dkk, Jakarta: Serambi.
- M. Najib Azca, 1998, *Hegemoni Tentara*, Yogyakarta: LkiS.
- Machfud Syaefudin dkk, 2013, *Dinamika Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mardalis, 1995, *Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marwati J. Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mavis Rose Terjemahan Hermawan Sulisty, 1991, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiharjo, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiharjo, 1999, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Pabottinggi, 1986, *Islam antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan-Muslim*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchlis Hamdi, 2014, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*, Bogor: Ghalian Indonesia.
- Nezar Patria, 1999, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nuruozzaman Shiddiqi, 1984, *Menguak Sejarah Muslim Indonesia: Suatu Kritik Metodologis*, Yogyakarta: PLP2M.
- Nouruzzaman Shiddiqi, *Sejarah Umat Islam Indonesia*.
- Noeng Muhajir, 1992, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rake Surasin.
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Onghokham, 1989, *Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta: Gramedia.
- Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, 1965, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Arsip Nasional.
- Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi.3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Robert Bocoock, 2007, *Pengantar Kompeherensif untuk Memahami Hegemoni*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Rusli Karim, 1985, *Dinamika Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Hanindita Press.
- Saifudin Zuhri, 2001, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Yogyakarta: LkiS.
- Sartono Kartodirjo, 1992, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia.
- Sartono Kartodirjo, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Slamet Mulyana, 2008, *Kesadaran Nasional II: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, Yogyakarta: LkiS.
- Snouck Hurgronje, 1973, *Islam Di Hindia Belanda*, Jakarta, 1973, Bharata.

- Soedjatmoko, 1995, *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Solichin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Supandi dan Ahmad Sanusi, 1998, *Kebijakan dan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud.
- Sutan Syahrir, 1995, *Perjuangan Kita*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur.
- Sutrisno Kutoyo, 1977, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Taufik Abdullah dkk (ed.), 2003, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI.
- \_\_\_\_\_ , *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 5: Asia Tenggara*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Thohir Luth, 1999, *Moh. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Intermedia.
- Tim Penyusun, 1981, *Diantara Hempasan dan Kenangan: Kenang-kenangan dr. Abdul Halim*, Jakarta: Arsip Nasional Indonesia.
- Tim Penyusun, 1988, *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*, Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat*, Bandung: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Proyek Penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah, 1978,  
*Sejarah DKI Jakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Penyusun, 1989, *Sejarah Institusi Politik Jepang*, Jakarta: PT. Gramedia.

Tim Penyusun, 1980, *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Timur*, Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Penyusun, 1980, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*, Jakarta:  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Tom R. Burn. dkk, 1988, *Manusia Keputusan Masyarakat Teori Dinamika Antara  
Aktor dan Sistem untuk Ilmuan Sosial*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Uka Tjandrasasmita, 2009, *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: Kepustakaan  
Populer Gramedia.

Umar Hasyim, 1998, *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, Jakarta: Bina Ilmu.

Yamada Kiichi, 1912, *Kebijaksanaan Ekspansi ke Selatan dan Kepulauan  
Ogasawara*, Kyoto: Hotengijuku.

Zuber Usman, 1970, *Bahasa Persatuan: Kedudukan Sejarah dan persoalan-  
persoalannya*, Jakarta: Gunung Agung.

**Arsip:**

Museum Radya Pustaka Mangkunegaran, Surakarta.

Asia Raya, 1 Februari 1943

Asia Raya, 28 Januari 1944

Asia Raya, 18 Mei 1944.

Asia Raya, 20 Juni 1944.

Perpustakaan Arsip Puro Pakualaman, Yogyakarta.

Arsip Pakualaman VII, 1944

Arsip Pakualaman 1944.

Arsip Pakualaman VII, *Assistent-Resident, Afdeelingshoofd Van Yogyakarta.*

**Jurnal:**

Nurdiyanto, *Tentara Pembela Tanah Air di Cilacap 1943-1945*, Patra Widya Vol. 4 No.1 Maret 2003, hlm. 100, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Nurul Hak dan Suhartono, *Perubahan Sosial Pesantren di Tasikmalaya pada Paruh Pertama Abad ke- 20 (1905-1950)*, Jurnal HUMANIKA Vol. 17 No. 3 Juli 2004, Yogyakarta.

Sanusi, *Penyajian Sejarah dan Pemahaman Ilmu Sejarah*, Dokumen Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta 1985, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Zamakhsyari Dhofier, *K.H Hasyim Asy'ari Penggalang Islam Tradisional*, Jurnal Prisma, 1 Januari 1984.

Prisma 4 April 1981.

Prisma No. 1 Januari, 1984

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Farida Yuliana Safitri, S.Pd  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 4 Juli 1991  
Alamat : Jl. Sultan Agung Gg. Karet Bulurejo Rt.05/Rw.03  
Mertoyudan, Magelang  
No. Telp : +6285643913270  
Email : faridayulianasafitri@gmail.com  
Nama Orang Tua : Aliman (Ayah) dan Musyidatun (Ibu)

### **Riwayat Pendidikan:**

- 1995-1997 TK AISIYAH BUSTANUL ATFAL 6 MAGELANG
- 1997-2003 SD NEGERI JURANGOMBO 1 MAGELANG
- 2003-2006 SMP NEGERI 7 MAGELANG
- 2006-2009 SMA NEGERI 5 MAGELANG
- 2009-2013 JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- 2014-2016 KONSENTRASI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA

### **Riwayat Pekerjaan**

- 2013-2014 Guru di MA Sunan Pandanaran, Yogyakarta
- 2014-2016 Staf Pengajar di Ganesha Operation, Yogyakarta
- 2014-2016 Guru di SMA Negeri 1 Pakem, Yogyakarta

#### Seminar dan Pelatihan yang Pernah Diikuti

- SHORT COURSE ON “A COMMON WORD: PERSPECTIVES OF MUSLIMS AND CHRISTIANS”, YOGYAKARTA
- INTERNATIONAL CONFERENCE “NEW TRENDS IN THE STUDY OF ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES”
- SEMINAR NASIONAL “KEPEMIMPINAN NASIONAL: ARAH DAN PERSPEKTIF BARU”
- SEMINAR NASIONAL “PRAKSIS PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI DAN TRANSFORMASI ISLAMIC-STUDIES DI UIN SUNAN KALIJAGA”
- SEMINAR NASIONAL “NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN”
- SEMINAR NASIONAL “TERORISME DALAM PANDANGAN ISLAM”
- SEMINAR “MUATAN KARAKTER PEMBELAJARAN SEJARAH DALAM KURIKULUM 2013”
- SEMINAR “ NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL”
- SEMINAR “ KAJIAN SEJARAH LOKAL SLEMAN UNTUK PEMBELAJARAN DI SEKOLAH”
- SEMINAR “ TANTANGAN MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM KURIKULUM 2013”
- TRAINING EMOTIONAL SPIRITUAL QUESTION 165
- TRAINING PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI KURIKULUM 2013 PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
- TRAINING INSPIRING, MOTIVATION DAN FRESH SOFTBOUND MEWUJUDKAN PRIBADI BERKUALITAS
- TRAINING PENDEKATAN SAINTEK DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

- TRAINING KURIKULUM 2013 PADA MATAPELAJARAN KEAGAMAAN DI MADRASAH